

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya organisasi regional dalam mengatasi konflik di kawasan Negara anggota organisasi regional itu sendiri. Uni Afrika dalam mengatasi konflik internal Sudan di Darfur. Uni Afrika dalam upaya mengatasi konflik di Darfur pada periode 2003-2006 mengirimkan pasukan dengan misi perdamaian dan melakukan berbagai upaya untuk menghentikan konflik. Keterlibatan Uni Afrika untuk melakukan resolusi konflik di Darfur adalah keterlibatan pihak luar pertama di wilayah ini. Dan AMIS yang merupakan hasil dari kesepakatan Uni Afrika adalah pasukan yang pertama kali boleh memasuki dan menjalankan misi penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil di Darfur.

Afrika merupakan daerah rawan konflik yang sangat beragam dengan perbedaan. Baik itu konflik intra Negara ataupun antarnegara. Tidak lain dengan Sudan. Sudan merupakan Negara Republik yang terdiri dari 40 hingga 90 kelompok etnis. Secara garis besar, kelompok etnis ini berkebangsaan Arab dan sebagian berkebangsaan Afrika. Darfur adalah daerah di bagian barat Sudan dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 6 juta jiwa. Karena intensitas bermusuhan dengan alasan ketidakpuasan penduduk Afrika asli terhadap pemerintah pusat yang kebanyakan berkebangsaan Arab dan juga karena perbedaan SDA. Berbagai bentuk pemberontakan oleh warga Afrika diredam oleh pemerintah Sudan. Dari sinilah konflik Darfur bermula.

Meskipun masih terus bergulir dan telah memperoleh beberapa hasil yang penting, proses perundingan untuk penyelesaian konflik di Darfur belum dapat dipastikan kapan dapat menghasilkan suatu formula perdamaian yang komprehensif. Terdapat beberapa hambatan dalam proses perdamaian di Darfur. Masih belum adanya upaya yang serius dari pemerintah Sudan untuk melakukan pelucutan senjata terhadap Janjaweed. Akibatnya, situasi keamanan, terutama warga sipil masih belum terjamin. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh milisi

Janjaweed dapat berpotensi memancing kedua pihak untuk kembali menggunakan opsi militer.

SLM/A merupakan pemberontak dari kebangsaan Afrika, dimana mereka menginginkan kesetaraan antar semua bangsa Sudan. Aksi-aksi SLM/A didukung oleh JEM. Tetapi pemerintah Sudan membuat kelompok untuk melawan para pemberontak ini, yaitu Janjaweed. Jatuhnya korban dari masing-masing pihak tidak terelakan. Warga sipil yang tidak mempunyai kaitan pun turut menjadi korban. Warga Darfur menjadi korban terbesar dari pertikaian etnis yang terjadi di daerahnya sendiri. Baik pemerintah Sudan maupun Janjaweed seringkali menganggap bahwa warga Darfur merupakan anggota pemberontak SLM/A atau JEM sehingga mereka dituduh melindungi keberadaan pemberontak kemudian diserang, wanita diperkosa, anak-anak disiksa dan perkampungan mereka dibakar. Perpecahan dalam tubuh pemberontak atau antara SLM/A dan JEM menimbulkan kesulitan dalam perundingan. Memang berbagai upaya rekonsiliasi cukup mampu meredam perselisihan tersebut. Dalam berbagai putaran perundingan keduanya juga bergabung dalam satu delegasi. Meskipun demikian, belum ada kesepakatan mengenai format penyelesaian seperti apa yang hendak dicapai bagi Darfur, Perpecahan ini selain menyulitkan posisi pemberontak juga dapat dieksploitasi oleh pemerintah Sudan untuk mendelegitimasi delegasi pemberontak, yang ada akhirnya akan mempengaruhi jalannya proses perundingan politik.

Konflik Darfur pun menjadi pusat perhatian karena begitu banyak jatuh korban sebanyak 10.000 jiwa selama Januari 2004 sehingga masuk kedalam kejahatan genosida. Kecaman dari masyarakat internasional pun bertaburan. Mereka menginginkan adanya keadilan di Sudan. Karena semakin lama konflik ini menjadi konflik antarnegara karena banyaknya warga Negara Darfur yang secara besar-besaran mengungsi ke Chad yang mana merupakan Negara tetangga Sudan. Sekitar 200.000 warga Sudan mengungsi ke Chad.

Perdamaian di Darfur memang sangat bergantung pada sejauh mana komitmen pemerintah Sudan dan para pemberontak. Kesiediaan pemerintah untuk memberikan konsesi politik dan ekonomi melalui suatu mekanisme pembagian kekuasaan yang seimbang akan menentukan arah proses perdamaian. Namun, keterlibatan aktor-aktor eksternal utama dalam proses perundingan perlu lebih

meperkuat upayanya membantu penyelesaian konflik baik melalui penurunan pasukan perdamaian yang lebih besar maupun dengan mengefektifkan proses perundingan. Sementara itu, PBB selalu melakukan pengawasan di Darfur.

Kecaman dari masyarakat internasional tentu membuat organisasi internasional PBB tergerak untuk melakukan intervensi ke Sudan. Ketidakbukaan pemerintah Sudan pun merupakan salah satu penghambat PBB untuk mengintervensi Sudan dan mengurangi jumlah korban. Kecaman demi kecaman yang pada akhirnya menunjuk pada sebuah organisasi regional di kawasan tersebut yaitu Uni Afrika. Uni Afrika pun merupakan perundingan yang terbaik untuk menggantikan OAU. Uni Afrika memiliki badan-badan dengan tugas-tugas dan fungsi yang lebih spesifik. Hal ini mencerminkan keseriusan para pemimpin Afrika untuk membangun kawasan Afrika kearah yang lebih baik terutama dalam hal pembangunan dan ekonomi. Salah satu yang membuktikan bahwa Uni Afrikan menghasilkan keputusan yang baik adalah terciptanya Dewan Keamanan yang memungkinkan Uni Afrika melakukan itervensi terhadap Negara anggotanya. OAU tidak memiliki itu. Salah satu alasan para pemimpin Afrika mengubah OAU menjadi Uni Afrika adalah untuk memiliki sebuah badan yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan serta stabilitas kawasan Afrika. Hal inilah yang menjadi alasan Dewan Keamanan di Uni Afrika dibentuk.

Organisasi regional Uni Afrika bertugas untuk mempromosikan perdamaian, kemandirian dan stabilitas di Afrika, mengatasi dan mencegah perdamaian, keamanan dan stabilitas di Afrika, mengantisipasi dan mencegah timbulnya konflik, mempromosikan penerapan pembangunan perdamaian pasca-konflik, mempromosikan demokrasi, mengembangkan kebijakan pertahanan bersama serta mempromosikan demokrasi.

Terdapat beberapa faktor internal Uni Afrika terlibat dalam upaya mengatasi konflik Darfur. Faktor-faktor tersebut berupa komitmen yang dituangkan Uni Afrika pada pasal 3 dan pasal 4 Piagam Uni Afrika melalui cara Uni Afrika sendiri kemudian pasal 52 Piagam PBB yang menjelaskan kewenangan organisasi regional untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Uni Afrika yang mana pertama kali bagi

Uni Afrika menangani konflik dengan keputusan sendiri berhubung Uni Afrika pun baru dibentuk pada tahun 2002.

Keterlibatan Uni Afrika melalui AMIS untuk menghentikan konflik Darfur pun mempunyai hambatan tersendiri. Peperangan yang masih terjadi, pembunuhan warga sipil dan pembakaran desa-desa tak berhenti. Sejumlah mandat AMIS telah dikeluarkan tetapi wewenang yang dipegang sangatlah terbatas terlebih pemerintah Sudan tidak terlalu mendukung adanya peran AMIS. Keputusan Dewan Keamanan Uni Afrika pada 20 Oktober 2004 untuk memperluas mandate AMIS dibuat berdasarkan asumsi bahwa pemerintah Sudan akan memikul tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan dan keamanan kepada penduduk sipil Darfur. Namun sayangnya, pemerintah Sudan tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut sehingga kekerasan terhadap penduduk sipil masih sering terjadi. Sehingga mandat-mandat yang diberikan tidak memiliki aturan perang yang jelas. Tetapi di dua titik Darfur peran AMIS dapat mengendalikan situasi yaitu di Kebkabiya dan Labado. Kendala terakhir Uni Afrika di Darfur saat susahny peralatan dan logistic yang tidak memadai. Hal ini tentunya tidak lepas dari terbatasnya dana operasional Uni Afrika di Darfur. Jumlah peralatan-peralatan yang mendukung operasi militer seperti telepon satelit, kendaraan maupun perlengkapan kantor yang dimiliki AMIS sangatlah terbatas.

#### **IV.2 Saran**

Konflik yang terjadi di Darfur yang merupakan efek domino dari konflik sebelumnya konflik Sudan selatan yang mana kelompok-kelompok pemberontak SLM/A dan JEM melawan pemerintahan yang mana pemerintahan dibantu oleh milisi Janjaweed. Konflik yang berawal dari konflik domestik kemudian lambat laun menjadi konflik internasional karena salah satu faktornya sudah terjadi pelanggaran genosida sehingga menjadi perhatian masyarakat internasional. Uni Afrika selaku organisasi regional kawasan tersebut merasa terpanggil dan tertantang karena ini merupakan kali pertama Uni Afrika yang sudah bertransformasi dari Persatuan Organisasi Afrika menghadapi konflik di salah satu *region* mereka. Dari situlah terlihat bagaimana upaya-upaya Uni Afrika dalam

mengatasi konflik Darfur tersebut. Uni Afrika pun mengalami hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk member rekomendasi kebijakan:

- a. Wewenang penuh yang dipegang Uni Afrika hendaklah diisi dengan mandate-mandat yang kuat sehingga Uni Afrika dapat mengetahui sejauh mana Uni Afrika bisa berupaya dalam mengatasi konflik ini.
- b. Hendaklah berkewajiban untuk mematuhi segala perundingan-perundingan perdamaian yang telah disepakati diantara pihak yang bersengketa yakni, kelompok pemberontak SLM/A dan JEM, serta Pemerintah Sudan dan Janjaweed.
- c. Menghormati segala hasil keputusan perundingan-perundingan yang diupayakan Uni Afrika.
- d. Berhenti melakukan tindak-tindak kejahatan yang menimbulkan korban warga-warga sipil.
- e. Memberikan wewenang penuh kepada AMIS untuk melakukan pemeliharaan perdamaian dunia.
- f. Melaporkan setiap hasil yang telah dilakukan atas keputusan-keputusan kebijakan perundingan.

